



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMBUTAN

MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI

JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019





RPJMD mempunyai peran dan fungsi serta memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena :

- ❑ RPJMD yang telah disusun melalui pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;**
- ❑ RPJMD menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh aktivitas pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah pada setiap tahun anggaran; dan**
- ❑ RPJMD menjadi pedoman evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan hal ini sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**



- ❑ **Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu “TERWUJUDNYA JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK” pada dasarnya telah selaras dan berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang lima tahun kedua (tahun 2010-2014) dan lima tahun Ketiga (tahun 2015-2019) RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;**
- ❑ **Oleh karena itu, diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat diwujudkan masyarakat Jawa Timur yang lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya saing dan Berakhlak.**



Isu-isu strategis nasional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- ❑ **Peningkatan keterlibatan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; isu**
- ❑ **Pertumbuhan ekonomi yg berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-job, pro poor, pro-growth, dan pro environment*);**
- ❑ **Optimalisasai lahan tidur dan terlantar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, mencegah alih fungsi dan/atau alih kepemilikan lahan pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, ketersediaan bibit dan pupuk;**

- ❑ Mengembangkan pendidikan kejuruan dan keahlian untuk menciptakan sumberdaya manusia yang siap pakai dan unggul yang didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas dan jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pengembangan kearifan lokal;
- ❑ Kebijakan pengelolaan lingkungan agar diprioritaskan pada upaya mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan hutan degradasi lahan dan mencegah terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati;
- ❑ Ciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Pemberian pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat oleh unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- ❑ Mendorong investasi dan pengembangan usaha, pada kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan dan kawasan tertinggal, untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan antar kawasan/wilayah, memperhatikan keadilan berusaha antar pelaku usaha besar, menengah, kecil dan koperasi;
- ❑ Pembangunan infrastruktur untuk keterhubungan antar wilayah serta ketersediaan energi yakni harus berpedoman pada RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- ❑ Pengembangan wilayah supaya diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan tidak menghasilkan produk-produk yang bersifat substitusi, melainkan produk-produk yang saling melengkapi (komplementer);

- ❑ **Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sesuai konvensi PBB pada Tahun 1979, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;**
- ❑ **Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia telah diinstruksikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan;**

- ❑ **Pengarusutamaan gender (pro gender) yang menjadi salah satu strategi umum perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sekurang-kurangnya harus memperhatikan 4 (empat) aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;**
- ❑ **Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, diharapkan semua program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;**

- Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengintegrasikan pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah provinsi dengan RPJMD kabupaten/kota masing-masing;**
- Seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat membangun kerjasama dan bersinergi, untuk mencapai seluruh sasaran program pembangunan yang akan disepakati dalam forum ini apabila nantinya RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah.**



Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya saing dan Berakhlak melalui forum Musrenbang ini mendapat limpahan rahmat dan ridho Allah SWT.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

